

Menyambung Yang Retak

Jawa Pos • Minggu 2 Oktober 2016

Buku ini berisi kumpulan lima catatan gerakan rekonsiliasi kultural di level akar rumput. Sebuah cara agar anak bangsa tidak merawat dendam sejarah tak berkesudahan.

TERDAPAT dua "senjata sakti mandraguna" di Indonesia yang bisa digunakan untuk menghantam seseorang yang dianggap menyimpang dan tidak senapas dengan nafsu suatu ormas: "kafir" dan "komunis".

Dalam ajang pilkada, kata "kafir" acap ditempelokkan ke calon pemimpin nonmuslim. Sedangkan kata "komunis" dilekatkan ke tubuh orang yang dirasa berkekelakuan aneh menurut sebagian pihak. Meskipun, ideologi tersebut telah terkubur oleh sejarah. Menjadi rahasia umum, "senjata" itu *diungkal* (diasah) oleh suatu kelompok guna melancarkan aksi kekerasan, pemerasan, atau intimidasi.

Nyaris saban September dan saat ide rekonsiliasi terkait warisan sejarah tragedi 1965 hendak diimplementasikan, wacana "bahaya laten komunis" atau "kebangkitan kembali komunis" digembargemborkan sebagian elite.

Di lingkup akar rumput, tidak jarang wacana itu justru direspons secara berbeda, bahkan cuek. Di benak mereka, soal utama adalah apa dan bagaimana setiap warga, termasuk yang kadung dicap "komunis" atau "mantan PKI", berkontribusi dalam kehidupan kolektif. Itulah yang di-

maksud dengan masyarakat akar rumput telah mengembangkan nalar sosial sendiri.

Karya ini terbit tepat waktu, saat isu "komunis" di tanah air masih menjadi barang dagangan. Itu harus ditepis dan dicegah, timbang anak bangsa merawat dendam sejarah yang tidak berkesudahan.

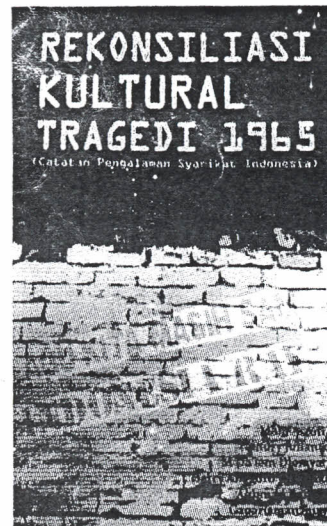
Buku ini laksana pelita yang menerangi warga yang "dibutakan" oleh segelintir elite demi memenuhi nafsu kekuasaan. Kita disugahi kumpulan lima catatan gerakan rekonsiliasi kultural di level akar rumput.

"Rekonsiliasi kultural" dimengerti sebagai suatu perajutan ulang relasi sosial yang pernah *dedel duwel* atau retak akibat warisan masa silam lewat artikulasi kultural. Kendati tidak terlembagakan, ia bisa dipahami sebagai kesepakatan yang mengikat. Tentu saja lingkup kesepakatan tersebut bersifat terbatas dan lokal.

Kegiatan bermisi mulia ini tidak selalu lempeng di lapangan. Muncul rintangan dalam mewujudkan rekonsiliasi kultural antara penyintas dan pelaku. Seperti yang dialami tim Lakpesdam Nahdlatul Ulama (NU) Banyuwangi.

Diceritakan, mereka kerap memperoleh teguran, ancaman, bahkan stigma sebagai PKI baru atau dikafir-kafirkan. Mereka pun diminta bertaubat dan kembali mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi, walau diganjar stigma sebagai pembela PKI, tekad Lakpesdam NU Banyuwangi tidak longsor dalam memperjuangkan kemanusiaan para penyintas tragedi 1965 (hlm 57).

Di Wonosobo lain alur kisahnya. Lahir ornop (organisasi non pemerintah sejumlah aktivis muda NU bernama Kolmaster - Koloni



JUDUL
Rekonsiliasi Kultural Tragedi
1965 (Catatan Pengalaman
Syarikat Indonesia)

PENULIS
Moh. Asrofi Dkk

PENERBIT
Penerbit Syarikat Indonesia

CETAKAN
Mei 2016

TEBAL
xxvi + 160 halaman

Masyarakat Terbuka) yang sejak mula menautkan diri ke dalam jaringan Syarikat Indonesia.

Kepedulian mereka membengkok untuk membangun hubungan harmonis antarkelompok agama, etnis, dan golongan di tengah gejala menguatnya sentimen primordialisme. Dari situlah mereka bersemuka dengan para mantan tapol 1965, yang merasa dan mengalami diskriminasi gara-gara stigma ideologi dan politik masa lalu ketimbang per-

bedaan agama. Digelar pertemuan dengan tapol, tetapi tetap dalam koridor dialog antariman kian digalakkan.

Nuansa pertemuan dibikin jauh dari formal. Selain sambung rasa, acara diselengi pertunjukan kesenian lokal. Dalam sambung rasa tersebut, barisan mantan tapol menemukan ruang bebas mengartikulasikan memori dan pengalaman pahitnya selama ini.

Selain itu, kelompok lain yang mendengarkan suara sunyi rombongan mantan tapol akhirnya meninjau ulang persepsi perih "mantan PKI" yang selama ini dicetak oleh Orde Baru. Mata hati dibuka, rupanya sejauh ini telah terjadi dehumanisasi para mantan tapol 1965 (hlm 89-109).

Sementara itu, di Batang, Jawa Tengah, juga terjadi gerakan apik serupa yang diinisiasi suatu organisasi kaum muda NU bernama ALUR (Aktivitas Layanan untuk Rakyat). Mereka berusaha mendampingi korban tragedi 1965 dalam wadah Paguyuban Anak Bangsa (PAB).

Rekonsiliasi harus berpihak kepada korban. Maka, mereka disodori pertanyaan: apa kebutuhan pokoknya? Jawabannya ialah *diuwongke* (diperlakukan secara manusiawi) di masyarakat.

Selama ini mereka merasa hanya hidup secara fisik, namun jarang sekali diikutsertakan dalam ragam kegiatan publik dan dianggap sebagai "liyan", "musuh". Ditambah lagi mayoritas para korban berkalung kemiskinan, hidup pada taraf prasejahtera.

Keberadaan PAB di Batang hampir bisa dikatakan tidak menjangkau batu sandungan atau gangguan dari masyarakat. Sewaktu menggelar arisan dan pertemuan para penyintas tragedi 1965,

semuanya berjalan lancar.

Memang, gerakan kultural merupakan aksi yang gaungnya tidak tampak dan dirasakan banyak pihak. Tetapi, lantaran sifatnya tidak frontal, dilambri cita rasa kultural setempat, serta menggunakan momen yang diterima banyak orang dan "nonpolitis", gerakan tersebut kudu berkelanjutan dan didukung sepenuhnya.

Karya ini berbisik kepada kita bahwa rekonsiliasi tidak hadir dengan sendirinya. Namun, ini bersumber dari kemauan kuat dari pelaku untuk mengakui kesalahan dan keikhlasan penyintas melabuh dendam.

Rekonsiliasi mustahil terwujud tanpa pengakuan dan penerimaan dua pihak. Rekonsiliasi pelanggaran HAM sudah dikerjakan di beberapa kota. Pemerintah selaku penyelenggara negara mestinya juga menjalankan kewajiban dalam memenuhi hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan menjamin kekerasan tidak bakal berulang.

Buku ini menyentuh hati dan layak diapresiasi. Sebab, menyediakan jurus jitu bagaimana menyambung ikatan sosial yang retak gara-gara tragedi kemanusiaan pada masa lampau. (*)



HERI PRIYATMOKO
Dosen sejarah Universitas
Sanata Dharma,
Sejarawan Solo